

PROSPEK KETAHANAN NASIONAL DALAM ERA REFORMASI DAN OTONOMI DAERAH

H. Budi Santoso*)

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya, perlu memiliki Ketahanan Nasional yang mampu mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari mana pun datangnya. Ketahanan nasional dapat dianalogkan seperti ketahanan tubuh manusia yang selalu dibina agar selalu mampu mengatasi segala serangan penyakit dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu ketahanan nasional adalah dinamis, pada suatu saat dirasakan kokoh/tangguh, tetapi pada saat lain dapat mengalami kemerosotan atau tidak tangguh. Hal ini dipengaruhi oleh tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang timbul dihadapkan kepada bagaimana kita membangun kemampuan mengatasinya.

Walaupun setiap bangsa berusaha selalu memiliki ketahanan nasional, namun cara mengembangkannya berbeda-beda, sesuai dengan falsafah, budaya dan pengalaman sejarah perjuangannya masing-masing. Ketahanan nasional Indonesia dikembangkan berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, khususnya Pembukaannya yang memuat cita-cita dan tujuan nasional, Wawasan Nusantara (Wasantara) sebagai wawasan nasional Indonesia, untuk mampu mengatasi segala tantangan,

ancaman, hambatan dan gangguan yang timbul dari perkembangan situasi dan kondisi dalam dan luar negeri, ketahanan nasional harus dikembangkan dengan nilai-nilai instrumental dan praksis yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Mulai 2 tahun terakhir ini Indonesia mengalami perkembangan tatanan intern berupa reformasi pembangunan dan otonomi daerah yang memiliki perbedaan paradigma yang cukup signifikan dibandingkan dengan tatanan sebelumnya. Oleh

*) *Mayjen TNI (Purn.) H. Budi Santoso S., S.E., Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.*

karena itu kita perlu menelaah bagaimana prospek ketahanan nasional dalam era reformasi pembangunan dan otonomi daerah yang juga tidak terlepas dari berbagai faktor berpengaruh baik dari dalam maupun luar negeri.

Konsepsi Ketahanan Nasional Pengertian, Asas dan Ciri

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG), baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Hakikat Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

Dalam uraian tersebut di atas, Tannas adalah kondisi kehidupan nasional yang diinginkan. Proses untuk mewujudkan kondisi tersebut, memerlukan kon-

sepsi yang dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional (Konsepsi Tannas). Konsepsi Tannas adalah konsepsi pengembangan kemampuan dan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Konsepsi Tannas merupakan sarana untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan nasional. Hakikat Konsepsi Tannas adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional.

Ketahanan nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila, UUD 1945 dan berpedoman kepada Wasantara dalam segenap aspek kehidupan nasional secara terpadu, utuh, menyeluruh. Dari uraian di atas dapat ditemukan asas dan ciri Tannas sebagai berikut.

a. Asas terdiri atas (1) kesejahteraan dan kemananan, (2) komprehensif integral, (3) mawas ke dalam dan ke luar, dan (4) kekeluargaan dan kebersamaan.

b. Sifat/ciri terdiri atas (1) dinamis, (2) mandiri, (3) kewibawaan, dan (4) tidak menguta-

makan pemaksaan kehendak dengan adu kekuasaan/kekuatan (fisik).

Tannas mencerminkan keterpaduan delapan gatra (Asta-gatra) kehidupan nasional, yaitu Trigatra Alamiah yang meliputi geografi/wilayah, kekayaan alam, dan kependudukan, dan Pancagatra Sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Ketangguhan Tannas pada dasarnya tergantung kepada kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan Trigatra untuk meningkatkan kondisi Pancagatra dalam wujud Ketahanan Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pertahanan dan keamanan. Kemampuan bangsa Indonesia yang dimaksud, sangat tergantung dari kualitas kepemimpinan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peranan dan Implementasinya

Peranan Tannas dan konsepsi Tannas dalam kehidupan nasional dan pembangunan nasional adalah (a) Tannas merupakan tolok ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional, (b) Tannas yang tangguh akan lebih mendorong lajunya pembangunan nasional dan keberhasilan pembangunan nasional akan lebih

meningkatkan ketangguhan Tannas, (c) Konsepsi Tannas merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional, (d) Konsepsi Tannas sebagai pola dasar pembangunan nasional dalam GBHN, pelaksanaannya dituangkan dalam PROPENAS dan REPETA.

Oleh karena Tannas merupakan resultante dari ketahanan seluruh Pancagatra Sosial, maka diperlukan kriteria dari ketahanan gatra-gatra tersebut sebagai berikut.

a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.

c. Ketahanan ekonomi adalah

kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

d. Ketahanan sosial dan budaya adalah kondisi kehidupan sosial dan budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membantuk dan mengembangkan kehidupan sosial dan budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Y.M.E., rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, se-rasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

e. Ketahanan pertahanan dan keamanan adalah dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan

menangkal segala bentuk ancaman.

Implementasi konsepsi Tannas dengan pendekatan *top down* dalam Pembangunan Nasional melalui perumusan Politik (*policy*= kebijaksanaan) dan Strategi Nasional atau Daerah dalam rangka menghadapi dan mengatasi TAHG, dan menjamin kepentingan nasional.

Politik dan strategi nasional/ daerah harus mengacu pada asas dan ciri Tannas dan dilaksanakan secara sinergik oleh segenap komponen bangsa pada supra, infra dan substruktur politik, baik di tingkat pusat maupun daerah otonomi.

Implementasi konsepsi Tannas dengan pendekatan *bottom up* bertumpu pada ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga, kemudian ditingkatkan pada ketahanan lingkungan dan ketahanan daerah yang resultante-nya adalah ketahanan nasional. Implementasi konsepsi Tannas dengan pendekatan *top down* dan *bottom up* harus sinergik.

Reformasi Pembangunan

Latar Belakang dan Tujuan Reformasi Pembangunan

Sejak pertengahan tahun 1997 bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang sangat berat. Krisis ini ditandai dengan makin terpuruk-

nya nilai mata uang terhadap dollar AS, membengkaknya hutang luar negeri pemerintah dan swasta, serta naiknya harga barang dan jasa produk impor dan juga produk dalam negeri.

Akibat krisis moneter dan ekonomi sebagian besar perusahaan swasta terpaksa menutup perusahaannya, sehingga banyak terjadi PHK, dan makin meningkatkan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran ini masih bertambah lagi dengan eks TKI bermasalah yang diusir dari negara tetangga, mengakibatkan permasalahan sosial yang makin luas dan kompleks. Naiknya harga barang dan jasa, makin menurunnya daya beli masyarakat pada umumnya, disertai adanya isu KKN, pemerintahan yang tidak demokratis, memicu timbulnya gerakan reformasi dan tuntutan agar Presiden Soeharto turun.

Gerakan reformasi pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan nasional, terutama kehidupan politik yang demokratis dalam suasana keterbukaan, menghormati HAM, serta bersih dari KKN dan ABS (Asal Bapak Senang), kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan makmur, supremasi hukum yang berdasarkan keadilan.

Pokok-pokok Reformasi dan Permasalahannya

Sesuai dengan makna refor-

masi adalah perbaikan tatanan dalam sistem kehidupan nasional dengan tertib dan damai, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar yang disepakati bersama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pembukaan-nya, dalam wadah negara Kesatuan RI NKRI, dengan catatan bahwa pasal-pasal UUD 1945 terbuka untuk diamandemen. MPR pada Sidang Umum tahun 1999 setelah menetapkan Haluan Negara Pokok-pokok Reformasi adalah (a) Pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana dan bertahap untuk mewujudkan tujuan nasional, (b) kondisi umum (kondisi awal) yang meliputi ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya merupakan prioritas aspek kehidupan yang perlu segera dibangun, (c) tujuan reformasi pembangunan meliputi: mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat, menegakkan hukum, serta agenda reformasi untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), dan (d) kebijaksanaan reformasi pembangunan meliputi ekonomi, politik, hukum, agama, dan sosial budaya.

Walaupun hakikat dan tujuan reformasi pembangunan sudah cukup jelas ditetapkan oleh MPR, namun kondisi kehidupan nasional masih jauh dari tujuan reformasi. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia

untuk melanjutkan dan menyukseskan reformasi pembangunan.

Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada masa Orde Baru otonomi daerah telah diatur dengan UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, namun kedua UU ini tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan situasi dan kondisi sehingga perlu diganti.

Penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, dan keadilan, serta keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.

Sasaran Otonomi Daerah dan Permasalahannya

MPR telah menetapkan kebijaksanaan otonomi daerah yang diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran adalah (a) peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah, (b) kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan, (c) untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan (d) menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Walaupun otonomi daerah telah diatur dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, namun penyelenggaraan otonomi daerah masih banyak mengalami hambatan antara lain belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dan kualitas

SDM terutama di daerah yang masih rendah dan diwarnai dengan maraknya pengelompokan primordial suku, etnis, agama dan kedaerahan.

Perkembangan Global, Regional, dan Nasional yang Berpengaruh

Dalam menganalisis prospek ketahanan nasional di masa mendatang, selain ditinjau dari reformasi pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah, kita tidak dapat terlepas dari perkembangan global, regional dan nasional yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

Global

Berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur ditandai dengan makin dominannya kepentingan ekonomi dan perdagangan. Negara-negara maju dan yang sudah mapan, menguasai sebagian besar modal dan teknologi, sehingga mendapatkan nilai tambah yang besar dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan perdagangan internasional. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang pada umumnya hanya memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang kualitasnya masih rendah, hanya memperoleh nilai tambah

yang relatif kecil, ditambah dengan kekalutan kondisi dalam negeri, berakibat masih sangat bergantung pada modal dan teknologi dari negara maju. Di samping itu, berbagai tuntutan demokratisasi, HAM, ketentuan-ketentuan perdagangan bebas, dan kelestarian lingkungan hidup, harus dipenuhi oleh negara berkembang, agar tidak dikenakan sanksi dari dunia internasional.

Dunia internasional telah mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan (UNCLOS 82). Hukum internasional juga menjamin Kedaulatan Indonesia dalam wilayah nasional. Cukup banyak pemerintahan negara di dunia yang mendukung persatuan bangsa Indonesia dan keutuhan wilayah NKRI (minus Timor Timur). Hal ini merupakan peluang yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menjamin persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI.

Regional

Perkembangan regional sangat dipengaruhi oleh kesepakatan tentang perdagangan bebas, yaitu AFTA yang akan berlaku pada tahun 2003, dan APEC akan berlaku pada tahun 2010 untuk negara maju, dan tahun 2020 untuk semua negara yang bergabung dalam APEC. Bila Indonesia tidak siap dengan

daya saing dan pengaturan perekonomian yang kondusif, maka Indonesia hanya akan berperan sebagai obyek dan pasar untuk produk barang dan jasa dari negara maju dan negara tetangga ASEAN yang sudah lebih siap. Namun demikian dengan posisi wilayah yang strategis dan potensi SDA dan SDM Indonesia yang besar, terbuka peluang untuk meningkatkan kerjasama sekawasan yang saling menguntungkan.

3. Nasional

Kehidupan nasional sejak pertengahan tahun 1998 sampai saat ini dalam kondisi terpuruk di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk memahami kecenderungan perkembangan situasi dan kondisi nasional, kita gunakan analisis Astagatra sebagai berikut.

Trigatra Alamiah

Pemanfaatan Trigatra sampai saat ini cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (ekosistem), sehingga mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Di samping itu juga menimbulkan pencemaran air, lahan dan udara. Kesadaran geografis bangsa Indonesia yang memiliki tanah air nusantara luas dan

memiliki posisi strategis, masih sangat kurang. Pada umumnya masih berorientasi ke daeratan, khususnya lingkungan tempat tinggalnya, sehingga kurang mampu memanfaatkan peluang dari kondisi wilayah yang luas dan strategis, serta memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam. Akibatnya bangsa lain yang lebih maju dapat menikmati keuntungan besar dari wilayah dan kekayaan alam Indonesia.

Pencurian kekayaan ikan di laut teritorial Indonesia, proyek penambangan tembaga dan emas oleh Freeport di Irian Jaya dan Newmont di Sumbawa, serta di tempat lain, menunjukkan indikasi keuntungan besar yang diperoleh bangsa lain. Keadaan ini diperparah dengan penduduk Indonesia yang sebagian besar masih berpendidikan rendah dan masih sangat kuat keterkaitan dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat sukunya, sehingga merupakan potensi atau kerawanan terhadap terjadinya konflik horizontal antarsuku.

Ideologi

Pancasila masih ditetapkan dan diakui oleh MPR sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional. Namun nilai-nilai Pancasila cenderung diabaikan pengamalannya, baik dalam perumusan aturan perun-

dang-undangan dan kebijaksanaan, maupun dalam sikap dan perbuatan para pemimpin bangsa dan elit politik. Banyak terjadi konflik vertikal dan horizontal antarwarga bangsa, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu diwaspadai adanya sisa-sisa kader dan simpatisan komunis dan sosialis yang cenderung menciptakan situasi *chaos* dalam rangka menyingkirkan ideologi Pancasila.

Politik

Salah satu sasaran reformasi pembangunan adalah demokratisasi yang antara lain mengubah sistem pemerintahan yang sentralistik, cenderung otoriter dan tertutup, menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik, demokratis dalam keterbukaan, serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM). Namun wajah demokrasi kita saat ini cenderung menjurus ke anarkhi. Kelompok kepentingan berusaha mengerahkan massa dengan tindakan yang cenderung brutal dan melanggar hukum, untuk memaksakan kehendaknya. Golongan separatis dengan seenaknya melanggar hukum, berkampanye dan propaganda mempengaruhi opini masyarakat, serta melancarkan teror dan pem-

berontakan bersenjata, tanpa segera dapat ditumpas oleh aparat keamanan. Otonomi daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2001, dipahami oleh daerah otonom kabupaten dan kota cenderung kebablasan. Kepala daerah otonom dengan tidak sabar menuntut kewenangan dan alokasi dana yang masih menunggu peraturan pelaksanaannya. KKN di daerah otonom yang didasari *exclusivesm* mulai muncul. Demikian pula konflik horizontal terjadi antarsuku, antara penduduk asli dan pendatang, bahkan antardesa. Pemimpin bangsa dan elit politik di pusat sibuk bertikai rebutan kekuasaan, sehingga kurang memperhatikan perhatian terhadap peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Ekonomi

Reformasi pembangunan di bidang ekonomi belum mampu mengatasi krisis ekonomi dan moneter, sektor riil belum berputar kembali, bahkan investor baru belum tertarik, sedangkan investor yang telah ada menarik diri dari Indonesia, dengan alasan situasi keamanan dan perburuhan yang makin tidak kondusif bagi usahanya. Kurs rupiah terhadap dollar cenderung menanjak terus, yang saat ini telah menembus Rp 10.000,- per 1 US dollar. Kesejahteraan rakyat

pada umumnya sangat merosot, pengangguran dan hutang luar negeri terus membengkak.

Sosial dan Budaya

Melalui sistem pendidikan nasional, pemerintahan berusaha meningkatkan kualitas SDM dan menanamkan kesadaran kebangsaan Indonesia yang berdasarkan semangat Bhineka Tunggal Ika. Namun akibat kekeliruan pelaksanaan pembangunan pada masa lalu dan adanya kecenderungan penyeragaman, maka terjadi kesenjangan sosial dan perasaan kurang dihormati budaya dan adat istiadat daerah/lokal. Dalam situasi krisis yang disertai euforia reformasi sampai saat ini telah terjadi makin menguatnya kembali pengelompokan masyarakat berdasarkan primordialisme suku, etnis, agama, dan daerah.

Supremasi hukum yang menjadi salah satu sasaran reformasi nasional, masih merupakan impian. Berbagai kepentingan politik dan ekonomi turut mencampuri (intervensi) dalam upaya penegakan hukum. Aparat penegak hukum masih terkesan sebagai alat kekuasaan.

Pertahanan dan Keamanan

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, aparat keamanan nyaris tidak berdaya, disebabkan oleh (1) trauma terhadap tuduhan pelanggaran HAM, (2)

peraturan hukum dan perundang-undangan yang kurang kondusif bagi upaya pembinaan stabilitas keamanan bagi POLRI dan TNI, di mana POLRI dan TNI dipisahkan secara hitam putih. POLRI bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri, sedangkan TNI hanya bertanggung jawab terhadap pertahanan untuk mengatasi musuh dari luar negeri. Padahal pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini, ancaman dari dalam negeri pasti ada kaitannya dengan luar negeri. Contoh AGAM di Aceh, sebagian besar pernah dilatih di Libya, mendapat bantuan senjata dari luar negeri dan didukung oleh kegiatan diplomasi di dunia internasional, (3) alat peralatan POLRI dan TNI beserta dukungan logistik dan kesejahteraan anggotanya sangat tidak memadai. Salah satu contoh adalah kapal patroli POLRI kalah cepat dengan kapal pencuri ikan, dan (4) kesadaran bela negara dan disiplin dari warga bangsa Indonesia pada umumnya cenderung menurun. Bahkan ada yang masih terus menghujat dan memojokkan TNI, terus mencurigai TNI dengan tuduhan TNI anti demokrasi, ingin kembali ke dunia politik dan berkuasa.

Potensi dan Peluang

Kondisi seperti tersebut di atas memberikan peluang bagi

para pengganggu keamanan dan gerakan separatis leluasa melakukan kegiatannya dalam bentuk wacana, teror dan pembentakan bersenjata, yang mengakibatkan stabilitas keamanan terus terpuruk, krisis ekonomi dan moneter terus berkelanjutan, kesejahteraan rakyat pada umumnya makin merosot. Selanjutnya masyarakat cenderung kembali kepada pengelompokan primordial suku, etnis, agama dan daerah. Bangsa Indonesia berada di ambang perpecahan (disintegrasi). Namun walaupun dengan potensi dan peluang sekecil apa pun, bangsa Indonesia terutama para pemimpin bangsa, elit politik dan para pemuda harus memiliki tekad dan semangat juang yang tinggi untuk meningkatkan kembali persatuan bangsa dan ketahanan nasional dalam wadah NKRI.

Dalam kondisi keterpurukan kehidupan nasional seperti yang telah diuraikan terdahulu, dan berbagai kendala dari perkembangan global, regional dan nasional, perlu kita mengidentifikasi potensi dan peluang bagi peningkatan ketahanan nasional dan melanjutkan reformasi pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dukungan Internasional

Hukum internasional dan pemerintah negara di dunia cukup

banyak yang mendukung persatuan bangsa Indonesia dan keutuhan wilayah NKRI (minus Timor Timur) termasuk pemerintah AS di bawah pimpinan Presiden Bush Jr., pemerintahan Australia, pemerintahan PNG, dan negara-negara ASEAN. Dukungan tersebut perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menghancurkan gerakan separatis bersenjata.

Komponen Bangsa yang Pancasila

Bertolak dari Pancasila sebagai falsafah/pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, masih cukup banyak komponen bangsa Indonesia yang Pancasila baik di pusat maupun di daerah, yang diharapkan dapat menjadi pelopor untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan Nusantara dan Konsep Ketahanan Nasional

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dan konsep ketahanan nasional sebagai konsep *survival* bangsa negara RI secara terus menerus dikaji ulang dan dimasyarakatkan melalui pendidikan di Lemhannas dan ceramah di berbagai forum di luar Lemhannas, diharapkan akan meningkatkan pemaham-

an akan pentingnya persatuan bangsa, keutuhan wilayah, eksistensi bangsa dan NKRI.

Masyarakat Indonesia yang Religius

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya religius, merupakan peluang untuk menanamkan nilai-nilai agama yang benar dalam moral dan etika penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

TNI dan POLRI yang tetap utuh

Walaupun telah mengalami hujatan, fitnah dan tarikan dari berbagai pihak, TNI dan POLRI tetap utuh, TNI tetap memegang teguh Sapta Marga, dan POLRI tetap memegang TRI BRATA, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persatuan bangsa, keutuhan NKRI dan suksesnya reformasi nasional.

Wilayah Indonesia dengan Sumber Daya Alamnya

Wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau lebih dengan laut teritorial dan yurisdiksi nasional yang sangat luas, serta dirgantara di atasnya mengandung potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar. Di samping itu wilayah Indonesia juga memiliki posisi yang strategis, dan pemandangan alamnya yang indah. Potensi dan posisi ini

bila dapat diamankan, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan mampu mendukung bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan melanjutkan pembangunan nasional.

Supremasi Hukum

Supremasi hukum yang telah disepakati menjadi sasaran reformasi pembangunan, merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan dalam mengatasi disintegrasi nasional dan penataan demokrasi Indonesia agar tidak menjurus ke anarkhi atau otoriter.

Prospek Ketahanan Nasional

Dalam rangka menganalisis prospek ketahanan nasional di masa depan dalam era reformasi dan otonomi daerah, kita perlu pertama meninjau apakah konsepsi Tannas masih releval dan valid, kedua apakah bangsa Indonesia di masa depan masih mampu memiliki Ketahanan Nasional untuk dapat keluar dari krisis, melanjutkan reformasi pembangunan dan menyelenggarakan otonomi daerah dengan sukses.

Tinjauan Relevansi Konsepsi Tannas

Pokok-pokok reformasi pembangunan menginginkan segera mengatasi krisis, melanjutkan pembangunan nasional secara terencana dan bertahap untuk

mewujudkan tujuan nasional, dengan prioritas pada bidang ekonomi, politik, hukum, agama, dan sosial budaya. Pokok-pokok reformasi pembangunan tersebut sangat relevan dengan konsepsi Tannas yang komprehensif integral dan keterpaduan antara pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Namun pemahaman terhadap reformasi pembangunan masih bermacam-macam, belum terdapat kesepakatan, bahkan ada yang memanfaatkan euforia reformasi untuk mencapai kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan kedaerahan sempit. Hal ini merupakan tantangan, hambatan, gangguan bahkan ancaman yang harus diantisipasi dengan konsepsi Tannas.

Pencapaian sasaran-sasaran otonomi daerah adalah perbaikan tatanan pemerintahan yang cenderung sentralistik, otoriter, kurang demokratis dan kurang menghormati HAM yang diwarnai KKN dan ABS, menjadi tatanan pemerintahan yang desentralistik, demokratis, menghormati HAM, bersih dari KKN dan ABS. Ini berarti pembenahan gatra politik, tetapi sangat terkait dengan gatra ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah otonom dan masyarakat daerah lebih diberdayakan dalam pembangunan nasional.

Sasaran yang ingin dicapai oleh otonomi daerah sangat relevan dengan konsepsi Tannas yang menginginkan pembangunan nasional secara komprehensif integral, terencana dan bertahap yang diselenggarakan secara sinergik antara segenap komponen bangsa, baik di pusat dan di daerah. Namun penyelenggaraan otonomi daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama belum lengkapnya peraturan pelaksanaan otonomi daerah, kurangnya kualitas SDM di daerah pada umumnya yang diwarnai sikap primordial yang kebablasan.

Ketahanan Nasional di Masa Depan

Walaupun bangsa Indonesia saat ini dan masa mendatang menghadapi berbagai kendala, tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang sangat berat, namun sekecil apa pun masih ada peluang dan potensi yang harus kita manfaatkan untuk memulihkan kembali ketahanan nasional yang tangguh.

Dalam rangka menyukseskan reformasi, diperlukan adanya kesepakatan tentang tujuan, sasaran dan agenda reformasi oleh elit politik supra, infra dan substruktur. Selanjutnya sesuai fungsinya masing-masing memberikan kontribusinya bagi suksesnya reformasi pembangunan.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diupayakan keluarnya semua peraturan pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999. Di samping itu perlu peningkatan pemahaman tentang otonomi daerah, pencegahan sikap dan tindakan pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang cenderung kebablasan, serta mewaspadai kegiatan provokator/subversi bagi kepentingan tertentu baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, serta berbagai kendala yang dihadapi bangsa Indonesia, harus berusaha diatasi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada. Bangsa Indonesia pada tahun 1966 sampai tahun 1970 telah berpengalaman keluar dari krisis, terutama dengan memanfaatkan potensi pertanian, perkebunan dan pertambangan minyak dan gas bumi.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa meskipun kondisi ketahanan nasional saat ini sedang lemah dan terpuruk, reformasi pembangunan dan otonomi daerah masih jauh dari apa yang diharapkan. Kondisi tersebut sudah menjurus ke terjadinya disintegrasi bangsa dan NKRI.

Ditinjau dari perbaikan kehidupan nasional dalam reformasi pembangunan dan tatanan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah, konsepsi Tannas masih relevan. Namun perlu aktualisasi, yaitu memerlukan kesepakatan para elit pada supra, infra dan substruktur tentang sasaran dan agenda reformasi pembangunan dan otonomi daerah, selanjutnya sesuai tugasnya masing-masing mampu memberikan kontribusinya bagi ketahanan nasional, dengan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa bersama kita.